BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap kalangan manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap warga negara indonesia mempunyai hak untuk memperoleh suatu pendidikan maupun pada anak yang mengalami kelainan. Bahwa, telah dijelaskan dalam suatu Undang-Undang 1945 pasal 31 Ayat 1, yang tertulis "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dalam pernyataan pada Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasannya setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali satupun dapat menganyam pendidikan baik itu anak yang menyandang kelainan khusus juga berhak dan diberikan kesempatan yang sama sepertianak lain pada umumnya, baik secara formal maupun non-formal.[1]

Indonesia telah memperbaiki sistem pendidikan nasional dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan yakni salah satunya penyempurnaan sebuah kurikulum, dengan harapan dapat mewujudkan sebuah generasi yang nantinya akan mampu bersaing dan dapat menyesuakan diri dengan melalui perkekembangan Zaman. Perencanaan perubahan kurikulum Tahun ajaran 2013/2014 pemerintah pada bulan juli 2013 melalaui Depertemen pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud). Bahwa Setiap sekolah akan di berlakukan secara bertahap yakni perubahan kurikulum 2013 yang sebelumnya dalam perencanaan perubahannya Kemendikbud yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kurikulum 2013 ialah kurikulum instan yang siap diimplementasikan oleh seluruh pendidik, kapan saja dan dimana saja di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kalau dipahamai dan disikapi dengan baik bisa mengantarkan bangsa dan negara ini untuk mencapai masa keemasan di tahun 2045 nanti.[2]

Pada pelaksanaan pendidikan siapapun tidak boleh memandang baik dari segi latar belakang, kondisi fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional peserta

---

[1] Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4

[2] Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013*...hlm. 4

didik lainnya.[3] Karena pada dasarnya, tidak semua kondisi anak sama, Sehingga hal tersebut yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan pendidik. Kondisi seperti ini disebut sebagai ABK (anak berkebutuhan khusus). Anak yang berkebutuhan khusus biasanya di arahkan ke pendidikan formal sekolah luar biasa (SLB).

Penggunaan istilah luar biasa di awali dalam Undang-Undangan Nomor 4 tahun 1950 kemudian ditetapkan dan berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1954 pasal 7 ayat 5 yang penejalasannya bahwa dalam layanan memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan layanan pendidikan serta pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan pada kekurangan baik jasmani, maupun rohaninya, agar mereka mendapatkan pelayanan pendidikan serta dapat memiliki kehidupan lahir dan batin yang layak. Yang di maksud dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohaninya yaitu orang-orang yang buta, tuli, bisu dan yang memiliki kekurangan jasmani atau rohani lainnya.[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 pasal 3 poin e nomor 10 (sub e) istilah Sekolah Luar Biasa (SLB) terakhir digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yang intinya memberikan amanah bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang salah satunya ialah berkewajiban atas terselenggaranya Sekolah Luar Biasa, untuk itu pememrintah menghimbau agar setiap daerah menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa di daerah masing-masing.[5]

Anak berkebutuhan khusus dalam hal ini tidak lepas dari anak tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah lain dari anak yang memiliki kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata. Anak dengan kecerdasan di bawah rata-rata mengalami keterbelakangan mental cenderung sulit mengikuti program

[3] Asep Ahmad Sopandi, *Pengembangan Kurikulum bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 4 Padang dalam Setting Pendidikan Inklusif*, Jurnal pedagogi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , Vol. XIII No. 1 April 2013.

[4]Republik Indonesia. 1954. Undang-Undang No.12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajar di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1954, No.38. Sekretariat Negara. Jakarta.

[5] Republik Indonesia. 1954. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No.54. Sekretariat Negara. Jakarta.

pendidikan di sekolah biasa secara klasik, oleh sebab itu mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus sesuai dengan kemampuan anak tersebut.[6]

Dalam proses pembelajaran di sekolah dibutuhkan sebuah pedoman yaitu kurikulum. Pemerintah telah memberlakukan kurikulum sehingga setiap sekolah haruslah mengacu pada kurikulum yang diberlakukan. Untuk mencapai tujuan intruksional masing-masing sekolah, pihak sekolah dapat memodifikasi kurikulum jika dirasa perlu. Pada dasarnya kurikulum ditunjukkan untuk mengantar peserta didik pada tingkat pendidikan, perilaku dan intelektual, yang diharapkan membawa mereka pada sosok anggota masyarakat yang berguna bagi bangsanya.[7]

Di dalam kurikulum 2013 dirumuskan dalam bentuk deskriptif dengan sasarannya aspek afektif, aspek kognitif dan aspek psikomotor yang dimana harus dicapai oleh peserta didik. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, ketiga aspek tersebut selalu menjadi target pencapaian dan pengembangan. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena seperti yang sudah disebutkan bahwasannya kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan, dan kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Kurikulum harus dikembangkan dan dikemas sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum model pembelajaran tertentu dalam sekolah khusus dapat dikembangkan sedemikian rupa sebagaimana pengembangan kurikulum di sekolah reguler. Tentu tantangan pelaksanaannya lebih besar dibandingkan di sekolah reguler. Keragaman kebutuhan peserta didik *difable* (cacat/lumpuh) terhadap layanan pendidikan menyebabkan standar kompetensi/target kurikulum harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik.

Sekolah luar biasa dan sekolah reguler tentunya terdapat perbedaan kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah luar biasa tentunya di sesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan masing-masing peserta didik. Sebab, pesertaa didik

---

[6]Sutjiahati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: PT. Kefika Aditama, 2007), hlm. 103.

[7]Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori & praktik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 147.

yang berkebutuhan khusus mempunyai hambatan, kemampuan serta cara belajar yang berbeda dengan peserta didik di sekolah reguler. Namun, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan kurikulum yang diterapkan pada Anak Berkebutuhan Khusus (Tunagrahita) SMALB di SLB PGRI Dlanggu. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat mengamati atau memotret pembelajaran ABK tunagrahita sebagaimana yang telah disebutkan melalui kurikulum pendidikan. Mengingat dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 Ayat 1, tertulis "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", pendidikan di indonesia mewajibkan semua penduduknya untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun dengan tidak memandang kondisi fisik maupun jasmani seseorang.

Sekolah Luar Biasa (SLB) PGRI Dlanggu adalah salah satu SLB yang ada di Kabupaten Mojokerto letaknya di jalan poros Bangsal – Pacet. Dengan jumlah peserta didik tahun saat ini sebanyak 95 peserta didik. Guru yang ada di SLB PGRI Dlanggu sebanyak 17 guru dan rata-rata guru yang mengajar memiliki kemampuan di ABK. Pada Anak Berkebutuhan Khusus meliputi beberapa jenjang kelas seperti kelas A (Tunanetra), B (Tunarungu), C (Tunagrahita), D (Tunadaksa) dan E (Autis). Semua jenjang ada ketunaan, tetapi tidak semua kelas ada. Untuk semua ruangan sebanyak 16 ruangan. Setiap 1 ruangan idealnya hanya 5 siswa dan 1 guru. Terdapat beberapa fasilitas seperti: peralatan tata boga, menjahit, kesenian dan lain-lain.

SLB PGRI Dlanggu berdiri pada tahun 1989 Salah satu perintisnya ialah Bapak Tatok Budi yang menjabat sebagai kepala sekolah hingga saat ini. Pak Tatok memulai dari nol untuk membangun sekolah tersebut dengan mencari Murid *Door To Door* melalui perizinan pihak Desa. Sebagai pemula pak Tatok hanya mengajar 7 sampai 14 orang dengan status gedung meminjam rumah penduduk (pengurus PGRI) kemudian pindah ke masjid dlanggu lalu pindah lagi ke salah satu sekolah dasar yang ada di daerah dlanggu. Hingga pada akhirnya peserta didik semakin berkurang dikarenakan sering berpindah-pindah tempat hingga tersisa 11 peserta didik dan diberikan ruangan yang tidak layak pakai. Kemudian pak Tatok mengabdi di sekolah tersebut sehingga terjadi perkembangan sekolah di beberapa aspek seperti pembenahan dan penambahan ruangan baru serta perkembangan minat calon peserta didik semakin meningkat hingga mendapat bantuan kemudian pihak SLB PGRI Dlanggu berfikir untuk merangkak dan membangun dari nol gedung yang akan dipakai untuk belajar.

Karena antusiasnya wali peserta didik untuk menyekolahkan anaknya sehingga menyalurkan bantuan dana dan bantuan sebagian dari pengurus PGRI. SLB PGRI Dlanggu termasuk pendidikan formal yang mempunyai peserta didik sekitar 93 orang. selain keberhasilan di bidang kreatif, lulusan peserta didik di sekolah tersebut ada yang bekerja di salah satu pabrik.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu karena SLB PGRI Dlanggu memiliki kelebihan, diantaranya : 1) Menerima semua jenis peserta didik berkebutuhan khusus, kecuali tunalaras (emosional tidak dapat mengontrol diri sendiri), 2) 95% tenaga pendidiknya adalah sarjana pendidikan luar biasa, dan magister pendidikan luar biasa, 3) Alumni SLB PGRI Dlanggu seperti tunarungu dan tunagrahita banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan, 4) Juara 1 tingkat kabupaten Mojokerto dalam bidang vokasi tataboga tahun 2020 dan 2021, 5) Juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur vokasi tataboga tahun 2021, 6) Juara harapan 2 tingkat Nasional bidang vokasi tataboga tahun 2021, 7) Lokasi sekolahan strategis, terletak tepat di 0 km jalan raya Bangsal – Pacet.

Hal tersebut menjadi tolak ukur peneliti untuk melakukan penelitian terkait Implementasi kurikulum yang diterapkan pada peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) khususnya Tunagrahita Di SMALB PGRI Dlanggu, Sehingga kurikulum tersebut dapat memberikan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus terutama pada Tunagrahita. Atas dasar itulah peneliti mengambil judul penelitian "Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunagrahita SMALB PGRI Dlanggu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunagrahita SMALB Di SLB PGRI Dlanggu?
2. Bagaimana Hambatan atau Tantangan Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunagrahita SMALB Di SLB PGRI Dlanggu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunagrahita SMALB Di SLB PGRI Dlanggu
2. Untuk mengetahui Hambatan atau Tantangan Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunagrahita SMALB Di SLB PGRI Dlanggu

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang kurikulum pada anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah luar biasa dan di sekolah inklusif, serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang manajemen pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Implementasi kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) khususnya pada ABK Tunagrahita dan dapat dijadikan sebagai penambah koleksi hasil-hasil penelitian khususnya yang menyangkut Implementasi kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) Tunagrahita.

   b. Bagi SLB PGRI Dlanggu

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengelolah sekolah khususnya wakil kepala kurikulum untuk implementasi kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK).

   c. Bagi Peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu yang

berharga dalam kehidupannya, serta dapat memperluas wawasan tentang pendidikan khususnya implementasi kurikulum.